



PROTEKSI ISI LAPORAN AKHIR PENELITIAN FUNDAMENTAL - REGULER

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

LAPORAN AKHIR

1. JUDUL PENELITIAN

Studi Perbandingan Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Praktik Moderasi Beragama di Komunitas Adat Maluku dan Papua

Bidang Fokus	Tema	Topik (jika ada)	Prioritas Riset
Sosial Humaniora	Pembangunan dan penguatan sosial budaya	Kearifan lokal	Lingkungan hidup

Rumpun Ilmu Level 1	Rumpun Ilmu Level 2	Rumpun Ilmu Level 3
AGAMA DAN FILSAFAT	ILMU FILSAFAT	Filsafat

Skema Penelitian	Strata (Dasar/Terapan/Pengembangan)	Nilai SBK	Target Akhir TKT	Lama Kegiatan
Penelitian Fundamental - Reguler	Riset Dasar	150.000.000	3	1 Tahun

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
RICARDO FREEDOM NANURU 0007067901 Ketua Pengusul Universitas Kristen Indonesia Maluku	Dosen	Teologi Kristen Protestan	Menyusun desain litbang, instrumen penelitian, pengambilan data lapangan, analisis data, membuat draft model kebijakan, menyusun laporan dan publikasi hasil penelitian.	257019
JOHNY CH RUHULESSIN 1224015701 Anggota Universitas Kristen Indonesia Maluku	Dosen	Teologi	Membantu menyusun desain litbang, memeriksa dan membantu pembuatan instrumen penelitian, ikut dalam penelitian lapangan, mengoreksi dan memperbaiki draft model, mengoreksi dan memfinalisasi draft artikel luaran wajib.	6648711
JUNSAL EFENDY DUAN 1201048101 Anggota Universitas Hein Namotemo	Dosen	Filsafat Keilahian	Membantu mengurus masalah teknis dan peralatan penelitian; Ikut dalam setiap rapat, penelitian lapangan, analisis, serta teknis pelaporan dan publikasi; Mengkoordinir dan mengarahkan tugas pembantu peneliti; ikut membantu dalam teknis pelaporan ke BIMA.	6162494
ROSALINA WAMESE 12175201200121 Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku	Mahasiswa	Teologi Kristen Protestan	Membantu Tim mengurus masalah teknis dan peralatan penelitian; Ikut dalam setiap rapat, penelitian lapangan, analisis, serta teknis pelaporan dan	-

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
			publikasi; Mengkoordinir dan mengarahkan tugas pembantu peneliti; Membantu Anggota 1 dalam teknis pelaporan ke BIMA.	
JAENY NOVITA SELEKY 12175201200065 Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku	Mahasiswa	Teologi Kristen Protestan	Membantu mengurus ijin penelitian; Mengkoordinir korespondensi penelitian; Ikut terlibat dalam pengambilan data lapangan; Ikut membantu dan terlibat dalam analisis dan pelaporan serta publikasi hasil penelitian.	-

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (Jika Ada)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Dana
-------	------------	------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
1	Artikel di Jurnal	Artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	Accepted/Published	HTS Theologiese Studies / Theological (Scopus Q1 - https://hts.org.za/index.php/hts) - (url scopus: https://www.scopus.com/sourceid/19300157105)

5. ANGGARAN

Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Total RAB 1 Tahun Rp 85.930.000,00

Tahun 1 Total Rp 85.930.000,00

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	Honorarium narasumber	Horarium Pembaca ahli draft luara penelitian (Sinode GPM, Sinode GKI di Papua, Kemenag Provinsi/Kota)	OJ	4	900.000	3.600.000
Analisis Data	Uang Harian	Uang Harian anggota peneliti (dosen 1) selama proses analisis data (asumsi waktu efektif 8 hari)	OH	8	150.000	1.200.000
Analisis Data	Uang Harian	Uang Harian anggota peneliti (mahasiswa 2) selama proses analisis data (asumsi waktu efektif 8 hari)	OH	8	150.000	1.200.000
Analisis Data	Uang Harian	Uang Harian anggota peneliti (dosen 2) selama proses analisis	OH	8	150.000	1.200.000

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
		data (asumsi waktu efektif 8 hari)				
Analisis Data	Uang Harian	Uang Harian anggota peneliti (mahasiswa 1) selama proses analisis data (asumsi waktu efektif 8 hari)	OH	8	150.000	1.200.000
Analisis Data	Uang Harian	Uang Harian Ketua peneliti selama proses analisis data (asumsi waktu efektif 8 hari)	OH	8	150.000	1.200.000
Bahan	ATK	ATK untuk Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan Penelitian, Analisis Data, Pelaporan dan Publikasi.	Paket	1	3.010.000	3.010.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Meterai 10.000	Unit	35	12.000	420.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Tinta Printer Warna LaserJet 2100	Unit	2	210.000	420.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Tinta Printer Hitam LaserJet 2100	Unit	2	200.000	400.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	APC Artikel	Paket	1	12.770.000	12.770.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Konsumsi anggota peneliti (mahasiswa 1) selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OH	10	50.000	500.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Konsumsi anggota peneliti (mahasiswa 2) selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OH	10	50.000	500.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Konsumsi anggota peneliti (dosen 1) selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OH	10	50.000	500.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Konsumsi Ketua peneliti selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OH	10	50.000	500.000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	Konsumsi anggota peneliti (dosen 2) selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OH	10	50.000	500.000
Pengumpulan Data	Penginapan	Penginapan Ketua peneliti selama penelitian lapangan di Sorong (asumsi waktu efektif 12 hari).	OH	12	400.000	4.800.000

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pengumpulan Data	Penginapan	Penginapan anggota peneliti 1 dan 2 (dosen) selama penelitian lapangan di Sorong (asumsi waktu efektif 12 hari).	OH	12	400.000	4.800.000
Pengumpulan Data	Penginapan	Penginapan anggota peneliti 1 dan 2 (mahasiswa) selama penelitian lapangan di di Sorong (asumsi waktu efektif 12 hari).	OH	12	400.000	4.800.000
Pengumpulan Data	Tiket	Paket perjalanan PP Ambon - Sorong (Taksi ke Pelabuhan, Tiket Kapal Laut, Taksi ke hotel) 3 orang peneliti dosen dan 2 mahasiswa; per orang Rp. 1.550.000) untuk penelitian lapangan di Sorong.	OK (kali)	5	1.550.000	7.750.000
Pengumpulan Data	Transport	Transport lokal anggota peneliti (mahasiswa 1) selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OK (kali)	10	150.000	1.500.000
Pengumpulan Data	Transport	Transport lokal Ketua peneliti selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OK (kali)	10	150.000	1.500.000
Pengumpulan Data	Transport	Transport lokal anggota peneliti (dosen 2) selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OK (kali)	10	150.000	1.500.000
Pengumpulan Data	Transport	Transport lokal anggota peneliti (mahasiswa 2) selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OK (kali)	10	150.000	1.500.000
Pengumpulan Data	Transport	Transport lokal anggota peneliti (dosen 1) selama penelitian lapangan di Ambon (asumsi waktu efektif 10 hari).	OK (kali)	10	150.000	1.500.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Uang Harian anggota peneliti (mahasiswa 1) selama penelitian lapangan di di Sorong (asumsi waktu efektif 12 hari).	OH	12	380.000	4.560.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Uang Harian anggota peneliti (mahasiswa 2) selama penelitian lapangan di Sorong (asumsi waktu efektif 12 hari).	OH	12	380.000	4.560.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Uang Harian Ketua peneliti selama penelitian lapangan di di	OH	12	380.000	4.560.000

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
		Sorong (asumsi waktu efektif 12 hari).				
Pengumpulan Data	Uang Harian	Uang Harian anggota peneliti (dosen 1) selama penelitian lapangan di 3 kota/kabupaten di di Sorong (asumsi waktu efektif 14 hari).	OH	14	380.000	5.320.000
Pengumpulan Data	Uang Harian	Uang Harian anggota peneliti (dosen 2) selama penelitian lapangan di di Sorong (asumsi waktu efektif 12 hari).	OH	12	380.000	4.560.000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Sewa Ruang untuk sekretariat penelitian selama 6 bulan.	Unit	6	600.000	3.600.000

*. KEMAJUAN PENELITIAN

A. RINGKASAN

Penelitian ini menganalisis secara komparatif integrasi nilai- nilai kearifan lokal dalam praktik moderasi beragama di komunitas adat Maluku (Ambon) dan Papua (Sorong). Dengan pendekatan kualitatif- deskriptif dan desain studi kasus komparatif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat lokal. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola fungsional nilai adat dalam menopang harmoni sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran fungsional berbeda: di Maluku, Pela Gandong dan filosofi Hidup Orang Basudara berfungsi sebagai mekanisme restoratif untuk memulihkan kohesi sosial pascakonflik; sementara di Papua, simbol Noken dan Musyawarah Adat berfungsi sebagai mekanisme preventif struktural yang menjaga kesetaraan kolektif dan mencegah polarisasi. Perbedaan ini menegaskan bahwa moderasi beragama di Indonesia harus plural dan sesuai karakter lokal masing- masing wilayah. Temuan ini menghasilkan konsep “Fungsionalisme Kontekstual Pluralistik”, yang menolak pendekatan seragam dan menekankan pentingnya pluralitas mekanisme fungsional dalam menjaga stabilitas masyarakat majemuk. Secara praktis, penelitian merekomendasikan penguatan legal formal Pela Gandong di Maluku, perlindungan otonomi Musyawarah Adat di Papua, serta penyusunan modul edukasi Moderasi Beragama yang kontekstual untuk Indonesia Timur. Dengan mengintegrasikan nilai nilai lokal ini, moderasi beragama dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kohesi sosial yang berkelanjutan dan membumi di tengah tantangan era digital dan politik identitas.

B. KATA KUNCI

Studi Perbandingan; Komunitas Adat; Moderasi Beragama; Kearifan Lokal; Harmoni Sosial.

false

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan agama, yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Moderasi beragama menjadi pendekatan strategis yang menjembatani perbedaan, menumbuhkan toleransi, serta menolak ekstremisme dan kekerasan berbasis agama (1,2). Dalam masyarakat adat, praktik moderasi ini terintegrasi dengan nilai-nilai lokal yang hidup pada komunitas (3,4). Di Maluku, prinsip hidup orang basudara, *pela gandong*, dan gotong royong menjadi dasar relasi lintas agama, bahkan pascakonflik sosial pada akhir 1990-an (5,6). Di Papua, nilai *noken* sebagai simbol persatuan dan prinsip musyawarah adat membentuk sikap kolektif terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama (7,8). Nilai-nilai tersebut menciptakan komunitas yang inklusif dan berimbang (9). Namun, kajian komparatif mengenai integrasi nilai lokal ini dengan gagasan formal moderasi beragama dari negara masih terbatas (10,11).

Masalah utama penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik moderasi beragama di komunitas adat Maluku dan Papua? Dari pertanyaan utama ini, penelitian juga mengembangkan subrumusan: 1) Apa saja nilai-nilai kearifan lokal yang menopang praktik moderasi beragama di masing-masing wilayah? 2) Bagaimana pola interaksi antara nilai lokal dan kebijakan nasional moderasi beragama? 3) Apa perbedaan dan persamaan dalam integrasi tersebut di antara dua wilayah adat? Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan mengungkap dinamika lokal yang mungkin menjadi model nasional dalam penguatan moderasi beragama kontekstual.

Keunikan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan perbandingan antarwilayah adat untuk mengidentifikasi pola integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik moderasi beragama. Selama ini, studi moderasi beragama cenderung menekankan aspek normatif atau kebijakan negara, sementara dimensi lokal, khususnya yang berbasis adat, belum mendapat perhatian yang cukup (12). Penelitian ini menghadirkan perspektif yang lebih kontekstual, dengan menggali bagaimana nilai-nilai tradisional menjadi bagian aktif dari strategi moderasi beragama di tingkat komunitas (13). Pendekatan ini dapat memperluas pemahaman terhadap model moderasi yang tidak bersifat seragam, tetapi plural sesuai karakter lokal (14).

Urgensi penelitian ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tercermin dalam dokumen Asta Cita, khususnya pada Cita Keenam: Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta Cita Kedelapan: penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan budaya, serta peningkatan toleransi (15). Penelitian ini berkontribusi pada dua cita tersebut dengan memberikan pemahaman berbasis bukti mengenai bagaimana nilai-nilai lokal dapat memperkuat kohesi sosial dan keamanan komunitas melalui pendekatan moderasi beragama yang organik. Dengan demikian, penelitian ini mendukung pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.

Dalam konteks meningkatnya potensi radikalisme, polarisasi identitas, serta tantangan terhadap keberagaman di era digital, pendekatan moderasi beragama yang bersandar pada kearifan lokal dapat menjadi strategi efektif untuk pencegahan konflik sosial. Pendekatan kualitatif komparatif-konseptual digunakan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik moderasi beragama di

komunitas adat Maluku dan Papua. Pendekatan ini sejalan dengan teori fungsionalisme struktural yang menekankan bagaimana elemen budaya dan sosial berfungsi dalam mempertahankan keseimbangan masyarakat (16). Dalam konteks ini, nilai-nilai kearifan lokal berperan sebagai mekanisme yang mendukung harmoni dan stabilitas sosial melalui praktik moderasi beragama.

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun program-program dialog lintas agama dan penguatan toleransi berbasis lokalitas. Dengan menjadikan nilai-nilai adat sebagai bagian integral dari kebijakan moderasi, maka pembangunan sosial menjadi lebih berkelanjutan dan membumi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan integrasi kearifan lokal dalam moderasi beragama di komunitas adat Maluku dan Papua, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan merumuskan rekomendasi strategis penguatannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus komparatif, berfokus pada integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik moderasi beragama di komunitas adat Maluku (Ambon) dan Papua (Sorong). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pada kegiatan adat dan keagamaan, serta wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lokal, dengan target minimal delapan informan di setiap lokasi. Dokumentasi lapangan dilakukan dalam bentuk catatan naratif, transkrip wawancara, dan rekaman audio-visual untuk memperkaya validitas temuan.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap utama. Pertama, persiapan penelitian, yang meliputi studi literatur, penyusunan instrumen (pedoman wawancara dan lembar observasi), serta perolehan izin dari lembaga pemerintah maupun adat. Kedua, pengumpulan data lapangan, dengan melakukan observasi langsung dan wawancara individual tanpa forum diskusi kelompok, guna memperoleh data otentik dan kontekstual. Ketiga, verifikasi dan validasi data, yang dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan tokoh adat, pemuka agama, dan pejabat lokal, sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap akhir adalah analisis data, yang dilakukan secara manual dengan pendekatan analisis tematik. Proses ini dimulai dengan membaca seluruh transkrip wawancara dan catatan lapangan secara menyeluruh, kemudian melakukan koding pada bagian-bagian relevan. Kode yang dihasilkan dikelompokkan ke dalam kategori, seperti “nilai lokal inklusif”, “praktik lintas agama”, dan “respon terhadap kebijakan”. Selanjutnya, kategori tersebut dikembangkan menjadi tema-tema utama yang mencerminkan pola integrasi nilai kearifan lokal dengan praktik moderasi beragama. Analisis dilakukan secara komparatif antarwilayah untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan keunikan lokal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Temuan dan Kebaruan Penelitian

Studi tentang moderasi beragama di Indonesia telah menunjukkan pentingnya pendekatan lokal dalam memperkuat toleransi dan mencegah radikalisme. Saparudin & Al-Idrus (3) menekankan bahwa moderasi beragama yang bersandar pada nilai-nilai lokal dapat memperkuat kohesi sosial di masyarakat majemuk. Dalam skala global, Esposito & Voll (1) menyatakan bahwa keberhasilan demokrasi dan stabilitas sosial dalam masyarakat Muslim sangat tergantung pada penerimaan nilai-nilai lokal dalam praktik keagamaan. Namun,

kebanyakan studi tersebut masih bersifat normatif dan belum membedah secara kontekstual bentuk integrasi nilai adat dengan moderasi beragama, apalagi secara komparatif.

Penelitian oleh Mahyuddin, dkk. di Maluku menunjukkan bahwa nilai *pela gandong* berperan penting dalam membangun kembali kepercayaan antarumat beragama pascakonflik, tetapi belum menjelaskan keterkaitannya dengan kebijakan nasional moderasi beragama (5). Di sisi lain, Pamungkas dan Tri meneliti mencegah konflik antaragama di Papua (9), namun belum menyentuh aspek simbolik nilai adat seperti *noken* atau struktur musyawarah adat secara eksplisit. Hasan & Susanto (11) mengangkat relasi antara praktik adat dan agama dalam komunitas adat, tetapi tidak membandingkan konteks wilayah yang berbeda.

Penelitian ini diunggulkan melalui pendekatan kualitatif komparatif-konseptual yang memungkinkan identifikasi pola integrasi nilai lokal ke dalam moderasi beragama dalam dua konteks adat yang berbeda: Maluku dan Papua. Pendekatan ini berlandaskan pada teori fungsionalisme struktural (16), yang menekankan peran nilai budaya dalam menjaga kohesi sosial. Penelitian ini juga merespons gagasan Nasr (2) bahwa nilai-nilai spiritual dan budaya lokal memiliki potensi universal dalam mendorong perdamaian dan keberagaman. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam praktik moderasi beragama berbasis wilayah adat secara komparatif, yang menghasilkan model konseptual sebagai acuan kebijakan berbasis lokalitas.

2. Pemetaan Bentuk Integrasi dan Fungsi Kearifan Lokal

Bagian ini menyajikan data kualitatif deskriptif mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang berfungsi sebagai struktur penopang moderasi beragama di dua lokasi penelitian, Ambon (Maluku) dan Sorong (Papua). Identifikasi ini secara langsung menjawab rumusan masalah pertama mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang menopang praktik moderasi beragama di masing-masing wilayah. Penelitian ini menggunakan kerangka fungsionalisme struktural, memandang nilai-nilai budaya ini sebagai mekanisme fungsional yang secara aktif mendukung harmoni dan stabilitas sosial.

2.1. Maluku (Ambon): Fungsionalitas Restoratif *Pela Gandong* dan Hidup Orang Basudara

Komunitas adat di Maluku didukung oleh nilai-nilai fundamental seperti *hidup orang basudara*, *pela gandong* (ikatan persaudaraan antar-negeri/desa, seringkali lintas agama, bahkan sekarang dapat lintas kampus/perguruan tinggi), dan *gotong royong*. Nilai-nilai ini terbukti menjadi dasar relasi lintas agama yang kokoh, bahkan berhasil memulihkan kohesi sosial pascakonflik besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir 1990-an. *Pela gandong* memegang peran penting dalam membangun kembali kepercayaan antarumat beragama pascakonflik (5).

Dalam konteks fungsionalisme, kearifan lokal di Maluku berfungsi sebagai mekanisme restoratif. Fungsi utamanya adalah memulihkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*) setelah terjadi disfungsi besar (konflik). Keberhasilan struktur adat ini dalam mengaktivasi memori kolektif persaudaraan menunjukkan resiliensi yang mendalam. Bentuk integrasi *pela gandong* ke dalam moderasi beragama termanifestasi dalam tiga aspek utama: 1) Ritual rekonsiliasi bersama yang melibatkan komunitas lintas iman, 2) Pengakuan kolektif terhadap kesetaraan anggota *Pela* di mata hukum adat dan agama, dan 3) Penggunaan narasi *Carita Orang Basudara* dalam program edukasi toleransi (5).

Struktur ini menghasilkan kerangka moderasi yang sangat institusional dan teruji konflik. Namun, terdapat risiko bahwa moderasi beragama Maluku dapat bergeser menjadi toleransi reaktif, di mana mekanisme kohesi sosial hanya aktif dan optimal setelah potensi konflik muncul atau terjadi trauma. Untuk mencegah hal ini, kebijakan nasional harus berupaya mengubah fungsi *pela* dari mekanisme restoratif menjadi mekanisme preventif institusional dengan memastikan relevansi dan aktivasi nilai-nilai ini di masa damai (6).

2.2. Papua (Sorong): Fungsionalitas Preventif *Noken* dan *Musyawarah Adat*

Di Papua, penelitian berfokus pada Sorong, di mana nilai-nilai inti seperti *noken* sebagai simbol persatuan dan prinsip *musyawarah adat* menjadi penopang. Nilai-nilai ini membentuk sikap kolektif yang inklusif dan berimbang terhadap perbedaan, termasuk perbedaan agama, sehingga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik. Kearifan lokal di Papua diinterpretasikan sebagai mekanisme preventif struktural yang menjaga stabilitas sosial (7).

Noken melambangkan kolektivitas dan kepemilikan bersama, sementara *musyawarah adat* merepresentasikan struktur pengambilan keputusan yang wajib mengakomodasi perbedaan. Bentuk integrasi *noken* dan *musyawarah adat* terlihat pada 1) Penerimaan konsensus kolektif tentang batasan praktik keagamaan, 2) Sikap kolektif yang inklusif terhadap keberagaman, dan 3) Keterlibatan aktif tokoh adat dalam dialog antaragama (7, 8)

Model moderasi ini bergantung kuat pada otoritas adat lokal (*otoritas subsumption*). Apabila otoritas adat tergerus oleh faktor eksternal, seperti tekanan politik, ekonomi, atau isu-isu regional yang terkait isu Papua merdeka, fungsi preventif moderasi juga berpotensi melemah. Oleh karena itu, kerangka strategis kebijakan harus menguatkan legitimasi *musyawarah adat* sebagai benteng terdepan melawan polarisasi. Penguatan otonomi adat secara fungsional penting untuk memastikan bahwa mereka dapat secara efektif menjaga kohesi sosial (17).

2.3. Pemetaan Bentuk-Bentuk Integrasi Nilai Lokal dan Prinsip Moderasi Beragama

Pemetaan berikut mengklasifikasikan temuan berdasarkan integrasi kearifan lokal ke dalam empat pilar moderasi beragama, menunjukkan bagaimana fungsionalitas kearifan lokal beroperasi di kedua wilayah.

Table 1: Perbandingan Fungsionalitas Kearifan Lokal dalam Moderasi Beragama

Aspek Komparasi	Komunitas Adat Maluku (Ambon)	Komunitas Adat Papua (Sorong)
Nilai Inti Kearifan Lokal	<i>Pela Gandong, Hidup Orang Basudara, Gotong Royong</i>	<i>Noken, Musyawarah Adat, Prinsip Kolektif</i>
Fungsi Kunci (Fungsionalisme)	Mekanisme restorasi konflik dan dasar persaudaraan lintas iman (Fungsi Restoratif).	Mekanisme pembentukan sikap kolektif, persatuan, dan kebersamaan dalam perbedaan (Fungsi Preventif).
Integrasi Prinsip Moderasi		
Toleransi	Tinggi, diwujudkan dalam ritual bersama, dukungan, dan penanggulangan konflik kolektif.	Tinggi, diwujudkan dalam kesetaraan <i>musyawarah</i> dan penerimaan perbedaan identitas

Anti-Kekerasan	Kuat, sebagai akibat dari trauma konflik masa lalu dan kewajiban <i>pela</i> untuk saling melindungi.	agama. Kuat, sebagai hasil dari konsensus kolektif yang menghargai kemanusiaan.
Komitmen Kebangsaan	Terintegrasi melalui sejarah pengakuan kedaulatan (diakui bersama Muslim/Kristen).	Tantangan, karena isu politik regional dapat menggeser fokus dari persatuan ke identitas eksklusif.

3. Analisis Komparatif Pola Integrasi Antarwilayah Adat

Analisis ini menjawab rumusan masalah mengenai perbedaan dan persamaan pola integrasi antarwilayah adat, menyoroti mengapa model moderasi yang berbasis kearifan lokal tidak boleh dianggap monolitik. Ada persamaan fungsional, di mana nilai adat sebagai penyangga stabilitas, namun ada juga perbedaan kontekstual antara model restoratif Maluku dibandingkan model preventif Papua.

3.1. Persamaan Fungsional: Nilai Adat sebagai Penyangga Stabilitas

Persamaan utama yang ditemukan adalah bahwa nilai-nilai kearifan lokal di kedua wilayah berfungsi sebagai basis untuk relasi lintas agama yang inklusif dan berimbang, menciptakan komunitas yang stabil. Fungsionalisme Struktural menjelaskan bahwa *pela gandong* dan *noken* adalah simbol kolektif yang melampaui batas identitas agama. Struktur ini secara fungsional mencegah disintegrasi masyarakat majemuk dengan memastikan sistem sosial mempertahankan keseimbangan (*equilibrium*). Kedua model moderasi ini diklasifikasikan sebagai model organik dan membumi, yang tumbuh dari tradisi lokal, berbeda dengan pendekatan kebijakan yang seragam dan normatif.

3.2. Perbedaan Kontekstual: Model Restoratif Maluku vs. Model Preventif Papua

Meskipun keduanya mencapai tujuan fungsional yang sama (kohesi sosial), proses dan pola integrasinya berbeda secara signifikan, berdasarkan pengalaman historis dan struktur sosial yang dominan:

- Maluku (Model Restoratif): Integrasi didorong oleh trauma sejarah. Mekanisme moderasi (*pela*) bersifat kontraktual dan historis, menekankan kewajiban timbal balik yang dihidupkan kembali pasca-konflik. Ini adalah moderasi yang berbasis pada *ingatan* kolektif.
- Papua (Model Preventif): Integrasi didorong oleh tata kelola struktural. Mekanisme moderasi (*noken*, *musyawarah*) bersifat konsensual dan otoritatif, menekankan penerimaan kolektif yang terus-menerus terhadap perbedaan. Ini adalah moderasi berbasis *otoritas* adat.

Perbedaan pola ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional tidak dapat seragam. Kebijakan yang seragam berisiko gagal karena mengabaikan dualitas fungsional ini. Analisis ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang efektif harus secara spesifik memperlakukan Maluku sebagai wilayah yang membutuhkan penguatan institusional terhadap trauma masa lalu (memperkuat *pela* secara legal formal) dan Papua sebagai wilayah yang membutuhkan perlindungan struktural terhadap tekanan eksternal (menguatkan otonomi *musyawarah*). Model moderasi harus plural sesuai karakter lokal.

4. Dinamika Interaksi Kebijakan dan Faktor Kontemporer

4.1. Pola Interaksi: Keterlibatan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Nasional

Hasil analisis menemukan dua pola interaksi utama antara struktur adat (organik) dan kebijakan negara (formal) dalam konteks moderasi beragama, yang bertujuan menjawab rumusan masalah mengenai pola interaksi ini:

- 1) Adaptasi Saluran Struktural (*Structural Channeling*) di Maluku: Kebijakan moderasi nasional (misalnya program dialog) diterima dan disalurkan melalui struktur *pela gandong* yang sudah stabil. *Pela* berfungsi sebagai saluran legitimasi dan implementasi, mengurangi friksi antara kebijakan pusat dan tradisi lokal, dan memastikan implementasi cepat karena adanya ikatan moral dan sejarah yang kuat (18).
- 2) Subsumsi Otoritas (*Authority Subsumption*) di Papua: Nilai-nilai moderasi secara implisit sudah menjadi bagian dari prinsip *musyawarah adat*. Interaksi terjadi ketika kebijakan nasional di-*subsume* (dianggap sebagai bagian) dari keputusan kolektif adat. Tokoh adat menjadi filter dan penerjemah kebijakan, memastikan bahwa kebijakan tidak bertentangan dengan otonomi lokal (17).

Kunci keberhasilan interaksi ini adalah rekognisi fungsional oleh negara terhadap struktur adat. Ketika negara mengakui bahwa nilai lokal adalah *mekanisme* yang mendukung stabilitas, kebijakan yang dihasilkan menjadi organik dan berkelanjutan. Strategi kebijakan di Maluku harus fokus pada penguatan *saluran (pela)*, sedangkan di Papua pada penguatan *filter (musyawarah adat)*.

4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kontemporer

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat integrasi. Faktor pendukung utama adalah kekuatan institusional dari lembaga adat yang memiliki legitimasi sosial dan spiritual. Di kedua wilayah, Tokoh Adat dan Tokoh Agama aktif bekerja sama.¹ Selain itu, terdapat solidaritas transenden, seperti nilai *pela* di Maluku, yang melampaui batas agama dan menciptakan ikatan persaudaraan yang mengikat secara moral (19).

Faktor Penghambat (Disfungsional Eksternal):

- 1) Disfungsi Digital: Polarisasi identitas di era digital menjadi ancaman yang tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh mekanisme tradisional yang bersifat teritorial dan tatap muka.
- 2) Disfungsi Politik: Di Papua, isu terkait kemerdekaan (*Papua issues*) menjadi faktor penghambat yang berpotensi memecah belah solidaritas berbasis suku/agama, mengikis kohesi sosial (17).
- 3) Disfungsi Kajian: Kurangnya kajian komparatif dan sistematis menyebabkan kebijakan nasional seringkali tidak responsif terhadap konteks kultural masyarakat adat, sehingga mengurangi efektivitasnya.

Table 2: Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Kontekstual

Wilayah	Faktor Pendukung Utama (Internal/Organik)			Faktor Penghambat Utama (Eksternal/Disfungsional)		
	Kekuatan	Institusi	<i>Pela</i>	Trauma	sejarah	yang belum
Maluku (Ambon)						

Papua (Sorong)	<i>Gandong</i> dan Ingatan Kolektif Pasca-Konflik. Legitimasi <i>Musyawarah Adat</i> dan Simbol Persatuan <i>Noken</i> . ¹	sepenuhnya teratasi, dan tantangan politik identitas. Polarisasi digital, tantangan pembangunan yang tidak inklusif, dan isu politik regional yang mengancam kohesi.
----------------	---	--

5. Fungsionalisme Struktural dan Peran Kearifan Lokal dalam Moderasi Beragama di Maluku dan Papua

Penelitian ini menempatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai elemen esensial dalam teori sistem sosial Parsonian, yang berfokus pada bagaimana elemen budaya berfungsi dalam mempertahankan keseimbangan masyarakat.

5.1. Nilai Lokal sebagai Fungsi Laten dan Manifestasi dalam Sistem Sosial

Kearifan lokal seperti *pela gandong* dan *noken* merupakan fungsi laten dalam sistem sosial adat. Fungsi laten ini (toleransi, inklusivitas) menjadi fungsi manifest (terlihat) melalui praktik moderasi beragama. Di Maluku, fungsi laten *pela* termanifestasi kuat sebagai respon restoratif terhadap disfungsi (konflik). Sebaliknya, di Papua, fungsi laten *musyawarah adat* termanifestasi sebagai tata kelola sosial yang preventif. Peran tokoh adat dan agama sebagai *gatekeepers* aktif dalam mengintegrasikan nilai adat ke dalam praktik keagamaan formal memastikan bahwa struktur budaya dan struktur sosial bekerja secara harmonis demi stabilitas.

5.2. Keseimbangan Sosial (*Equilibrium*) melalui Praktik Moderasi Kultural

Penelitian ini menunjukkan bahwa *equilibrium* sosial di kedua wilayah dicapai melalui mekanisme integrasi diferensiasi. Moderasi beragama berfungsi sebagai *media* yang memungkinkan diferensiasi agama dan etnis untuk eksis tanpa mengganggu stabilitas sistem. Kontribusi teoretis utama penelitian ini adalah mengembangkan konsep “Fungsionalisme Kontekstual Pluralistik” dalam studi moderasi.

Model ini menyimpulkan bahwa stabilitas dalam masyarakat majemuk Indonesia diperoleh dari pluralitas mekanisme fungsional yang berbeda (restoratif vs. preventif). Temuan komparatif menunjukkan bahwa dua struktur budaya yang berbeda (*pela* dan *musyawarah*) dapat mencapai hasil fungsional yang sama (moderasi), namun melalui proses yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan sosial harus merespons kebutuhan fungsional spesifik wilayah untuk mencapai kohesi sosial, menolak pendekatan satu ukuran cocok untuk semua.

6. Model Integratif Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal: Kebaruan Konseptual dan Rekomendasi Strategis

Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual integrasi yang komparatif, yang merupakan kebaruan utama penelitian. Kerangka ini bertujuan menjadi acuan kebijakan berbasis lokalitas yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

6.1. Perumusan Kerangka Konseptual Integrasi Nilai Kearifan Lokal

Model yang dihasilkan terdiri dari Tiga Pilar Integrasi Fungsional:

- 1) Pilar Rekognisi Adat (Pengakuan): Pemerintah harus mengakui otoritas kearifan lokal

(Pela di Maluku, Musyawarah Adat di Papua) sebagai mitra setara dan institusi fungsional dalam moderasi beragama, memastikan pengakuan ini mencakup dimensi hukum.

- 2) Pilar Operasionalisasi Fungsional (Aktivasi): Nilai-nilai adat harus diaktifkan melalui program kerja yang spesifik, dengan aktivasi yang dibedakan: Restoratif (Maluku) dan Preventif (Papua).
- 3) Pilar Resistensi Digital (Perlindungan): Membangun mekanisme pertahanan digital (literasi media) yang diintegrasikan melalui struktur adat untuk melawan disfungsi eksternal seperti polarisasi identitas di era digital.

6.2. Policy Brief: Rekomendasi Penguatan Moderasi Beragama yang Kontekstual

Rekomendasi strategis yang dihasilkan melalui *policy brief* diarahkan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal, sejalan dengan visi pembangunan nasional.

1) Rekomendasi untuk Maluku (Reinforcement Institusional):

- Fokus: Memperkuat dimensi hukum dan kelembagaan *Pela Gandong*.
- Tindakan: Mendorong kebijakan daerah yang secara formal mengintegrasikan mekanisme *Pela Gandong* ke dalam prosedur penanganan konflik sosial, memberikannya legitimasi sebagai lembaga mediasi yang sah.

2) Rekomendasi untuk Papua (Protection Struktural):

- Fokus: Mengamankan otonomi dan otoritas *Musyawarah Adat* dari gangguan politik dan tekanan eksternal.
- Tindakan: Memberikan dukungan anggaran dan pelatihan teknis kepada tokoh adat untuk memimpin dialog lintas agama dan literasi digital, memperkuat otonomi adat sebagai filter kebijakan.

3) Rekomendasi Komparatif (Integrasi Nasional):

- Fokus: Mengubah Pendekatan Moderasi Nasional dari Seragam menjadi Pluralistik.
- Tindakan: Mengembangkan modul edukasi Moderasi Beragama yang berbeda untuk Indonesia Timur, yang secara eksplisit menggunakan narasi lokal Maluku dan Papua, mengakui bahwa model harus plural sesuai karakter lokal.

D. Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal memiliki peran fungsional berbeda namun sama-sama menopang praktik moderasi beragama. Di Maluku, *Pela Gandong* dan filosofi Hidup Orang Basudara berfungsi sebagai mekanisme restoratif yang mengembalikan kepercayaan dan kohesi sosial pascakonflik. Sementara itu, di Papua, simbol Noken dan Musyawarah Adat berfungsi sebagai mekanisme preventif struktural yang menjaga kesetaraan kolektif serta mencegah polarisasi sejak awal. Perbedaan ini menegaskan bahwa praktik moderasi beragama di Indonesia harus bersifat plural dan menyesuaikan karakter lokal masing-masing wilayah.

Temuan tersebut menghasilkan kerangka konseptual **“Fungsionalisme Kontekstual Pluralistik”**, yakni pandangan bahwa stabilitas sosial dalam masyarakat majemuk dicapai melalui pluralitas mekanisme fungsional yang berbeda. Maluku menampilkan pola adaptasi

saluran struktural, di mana kebijakan disalurkan melalui lembaga adat yang kuat, sedangkan Papua memperlihatkan pola subsumsi otoritas, di mana kebijakan formal dilegitimasi oleh struktur musyawarah adat. Dengan demikian, kebijakan moderasi tidak dapat seragam, melainkan harus menyesuaikan kebutuhan fungsional tiap wilayah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa: penguatan legal formal Pela Gandong sebagai lembaga mediasi konflik di Maluku, perlindungan otonomi Musyawarah Adat di Papua, serta penyusunan modul edukasi Moderasi Beragama yang kontekstual bagi Indonesia Timur. Nilai-nilai kearifan lokal ini merupakan aset kebangsaan yang, bila diintegrasikan ke dalam strategi moderasi, dapat membangun kohesi sosial yang kuat, berkelanjutan, dan selaras dengan tantangan zaman.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran melalui BIMA.

Luaran wajib telah di-submit ke Journal HTS Theological Studies (Scopus Q1), url: <https://hts.org.za/index.php/hts>, dengan judul artikel: *Integrating Local Wisdom into Religious Moderation: A Comparative Theological Reflection on Maluku and Papua Indigenous Communities*.

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* serta mengunggah bukti dokumen pendukung sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra dapat diunggah melalui BIMA.

Catatan:

Bagian ini wajib diisi untuk penelitian terapan, untuk penelitian dasar (Fundamental, Pascasarjana, PKDN, Dosen Pemula) boleh mengisi bagian ini (tidak wajib) jika melibatkan mitra dalam pelaksanaan penelitiannya

Penelitian ini tidak memiliki mitra.

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Penelitian ini memiliki beberapa kendala, yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan waktu penelitian terkait dengan berbagai kesibukan anggota tim sehingga tidak mudah untuk melakukan penelitian secara bersama.
- 2) Waktu penandatanganan kontrak dan pencairan anggaran yang membuat penelitian ini tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal pada proposal, sehingga perlu penyesuaian kembali.
- 3) Kesibukan dari para informan untuk diwawancarai karena tugas-tugas yang diemban.

G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian selanjutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Rencana tahapan selanjutnya pada tahun ini (penelitian hanya 1 tahun), adalah: mempersiapkan perencanaan dalam rangka merevisi artikel luaran wajib, serta mempersiapkan penelitian lanjutan yang didasarkan pada road map penelitian yang telah direncanakan sebelumnya.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Esposito JL. & Voll JO. Islam and Democracy. Oxford University Press, 1996. url: <https://bit.ly/3DXcGF6>
2. Nasr SH. The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity. HarperCollins Publishers, United State. 2002. url: <https://shorturl.at/nHuel>
3. Saparudin & Al-Idrus SA. Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal (Studi Awig-Awig Adat Sasak Islam dan Budha di Lombok Utara). Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UIN Mataram. 2023. url: <https://bit.ly/3FUSp3B>
4. Sutrisna A. Local Wisdom as the Basis for Religious Moderation in Indonesia Society to Realize Islamic Values Rahmatan lil ‘Alamin. Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities. 2021;6(2):243-256. url: <https://shorturl.at/mh94f>
5. Mahyuddin, Pikahulan RM, Fajar M. Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*. 2020;13(1):103-124. url: <https://bit.ly/4iZAze7>
6. Dominggus D. Systematic Literature Review: Fenomenologi Moderasi Beragama Islam dan Kristen di Maluku Berdasarkan Budaya Pela Gandong. *MELO: Jurnal Studi Agama-agama*. 2023;3(1):19-38. url: <https://shorturl.asia/VBTO6>
7. Kayame Y. Kearifan Lokal “Noken” Papua bagi Nilai Demokrasi Pancasila di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2022;2(12):448-456. url: <https://shorturl.asia/IUj0l>
8. Nur I. Religious Education Based of Local Wisdom “Satu Tungku Tiga Batu” in Fak-Fak Community West Papua. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*. 2022;14(4):6631-6642. url: <https://shorturl.asia/6HGwY>
9. Pamungkas C & Tri ID. Preventing Religious Conflict in Papua Land: Adopting Cultural Traditions of Peacebuilding. *Asian Journal of Peacebuilding*. 2021;9(2):331-356. url: <https://shorturl.at/MjDX4>
10. Faisal, A., Pabbajah, M., Abdullah, I., Muhammad, N. E., & Rusli, Muh. Strengthening religious moderatism through the traditional authority of *kiai* in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 2022;8(1). <https://shorturl.at/Z5IJF>
11. Hasan HN & Susanto E. Relasi Agama dan Tradisi Lokal. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019. url: <https://shorturl.at/FyIKj>

12. Akhmadi A. Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. Jurnal Diklat Keagamaan. 2019;13(2):45-55. url: <https://shorturl.at/CG13V>
13. Zubaidi A. Multicultural Insight in Promoting Tolerance Movement: Lesson Learned from Islamic Religious Education in the Rural Side. Pedagogik: Jurnal Pendidikan. 2024;11(1):19-35. url: <https://shorturl.at/Cc0jz>
14. Khoiruddin & Khulwah J. Moderasi Beragama dalam Kearifan Lokal pada Masyarakat Pesisir Barat Provinsi Lampung. Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama. 2023;3(1):76-91. url: <https://shorturl.at/SD1zL>
15. Wisnubroto K. Tantangan Besar, Asta Cita, dan Keberlanjutan Pembangunan. Portal Informasi Indonesia. 5 November 2024. url: <https://shorturl.at/xyXI3>
16. Parsons T. The Social System. Glencoe, IL: Free Press; 1951. url: <https://shorturl.at/AxA7m>
17. Luqman Al Hakim, & Dudung Abdurahman. (2023). MODERASI BERAGAMA DI PAPUA: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 49–64. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.171-04>
18. Azman A, Daud M, & Idris A. Religious Moderation, Pela Gandong, and Jihad Reconstruction: conflict Prevention in Maluku through the Lens of Maqāṣid Al-Sharī'ah, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2025, 9(1): 394-415. url: <https://shorturl.asia/id/GSXw9>
19. Malisngorar J & Sugiswati B. Pela Gandong Sebagai sarana Penyelesaian Konflik. *Perspektif*, 2017, 22(1): 67-79. url: https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/589/pdf_104.



Studi Perbandingan Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Praktik Moderasi Beragama di Komunitas Adat Maluku dan Papua

Dana Penelitian: 85.930.000

TKT Level 3

TIM PENELITI:

Ricardo Freedom Nanuru; Jhony Ch. Ruhlessin; Junsal Efendy Duan;
Rosalina Wamese; Jaeny Novita Saleky

LATAR BELAKANG, URGENSI, TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini **dilatarbelakangi** oleh kemajemukan agama dan budaya di Indonesia yang menuntut penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal, khususnya di komunitas adat Maluku dan Papua yang memiliki nilai-nilai seperti *pela gandong*, *hidup orang basudara*, *noken*, dan musyawarah adat sebagai penopang harmoni sosial. Namun, integrasi nilai-nilai tersebut dalam praktik moderasi beragama belum banyak dikaji secara komparatif. Penelitian ini **bertujuan** menganalisis dan membandingkan bentuk integrasi kearifan lokal dalam moderasi beragama di kedua wilayah adat tersebut. **Urgensinya** terletak pada kontribusi konseptual bagi pengembangan model moderasi beragama yang kontekstual, plural, dan relevan bagi penguatan kebijakan serta kohesi sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus komparatif di komunitas adat Maluku dan Papua, melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan tokoh adat dan agama, serta analisis tematik komparatif untuk mengidentifikasi pola integrasi kearifan lokal dalam praktik moderasi beragama..

LUARAN PENELITIAN

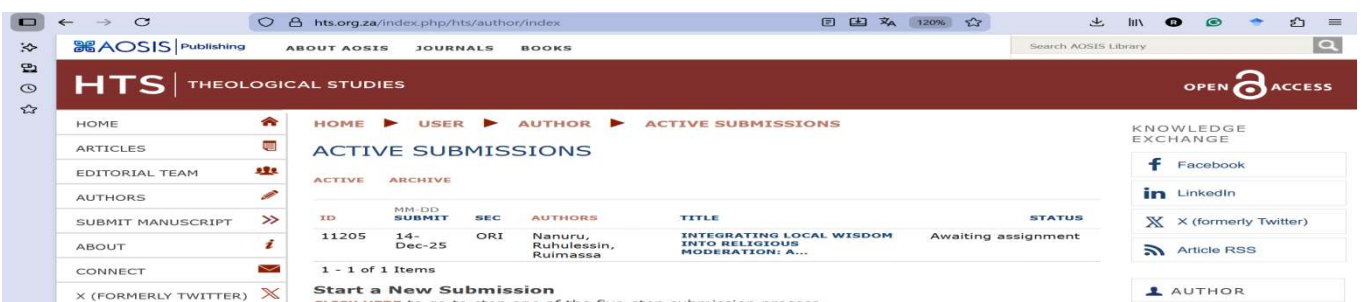
- Luaran penelitian ini berupa artikel ilmiah dan dikirim pada Journal HTS Theologiese Studies / Theological (Scopus Q1 - [https:// hts.org.za/ index.php/hts](https://hts.org.za/index.php/hts)).
- Luaran Luaran Wajib berstatus **submit** pada jurnal tujuan.

TEMUAN PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) di Maluku, moderasi beragama terintegrasi dengan nilai *pela gandong* dan hidup orang basudara yang berfungsi sebagai mekanisme restoratif dalam memulihkan relasi lintas agama pascakonflik; 2) di Papua, nilai *noken* dan musyawarah adat berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga harmoni dan mencegah polarisasi keagamaan; 3) kedua wilayah memperlihatkan penguatan toleransi, sikap anti-kekerasan, komitmen kebersamaan, dan kohesi sosial; serta 4) penelitian ini menghasilkan model moderasi beragama berbasis kearifan lokal yang

KATA KUNCI

Studi Perbandingan; Komunitas Adat; Moderasi Beragama; Kearifan Lokal; Harmoni Sosial.



UCAPAN TERIMA KASIH

- Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, atas dana Penelitian Fundamental Regular Tahun 2025.
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII di Ambon, dan Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia Maluku yang telah memfasilitasi sejak penulisan proposal sampai pelaporan penelitian ini.
- Para Pemangku Adat dan Pimpinan Lokal lainnya yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.



Integrating Local Wisdom into Religious Moderation: A Comparative Theological Reflection on Maluku and Papua Indigenous Communities

Ricardo Freedom Nanuru

Postgraduate Program in Protestant Christian Theology, Indonesian Christian University of Maluku, Ambon – Indonesia
e-mail: ricardonanuru632@gmail.com

Jhony Christian Ruhulestin

Doctoral Program in Protestant Christian Theology, Indonesian Christian University of Maluku, Ambon – Indonesia
e-mail: johnruhulestin1@gmail.com

Aleta Apriliana Ruimassa

Faculty of Theology, Indonesian Christian University of Maluku, Ambon – Indonesia
e-mail: aletaaprilianaruimassa@gmail.com

Abstract

This study comparatively analyzes the integration of local wisdom values into the practice of religious moderation within indigenous communities in Maluku (Ambon) and Papua (Sorong). Employing a qualitative-descriptive approach with a comparative case study design, data were collected through participatory observation and in-depth interviews with customary leaders, religious figures, and local community members. The data were analyzed thematically to identify functional patterns of indigenous values in sustaining social harmony. The findings suggest that nearby information performs distinct functional roles across regions: in Maluku, *Pela Gandong*, and the philosophy of *Hidup Orang Basudara* function as restorative mechanisms to rebuild post-conflict social concord; while in Papua, the *Noken* symbol and customary deliberation feature as structural preventive mechanisms that hold collective equality and save you polarization. These differences affirm that religious moderation in Indonesia must be pluralistic and aligned with local characteristics. This study introduces the concept of Pluralistic Contextual Functionalism, which rejects uniform approaches and emphasizes the importance of diverse functional mechanisms in maintaining stability within plural societies. Practically, the study recommends strengthening the formal legal recognition of *Pela Gandong* in Maluku, protecting the autonomy of customary deliberation in Papua, and developing contextual religious moderation education modules for Eastern Indonesia. By integrating these local values, religious moderation can serve as an effective strategy to foster sustainable social cohesion amid the challenges of the digital era and identity politics.

Contribution: This study contributes to theoretical development by introducing the concept of *Pluralistic Contextual Functionalism*, emphasizing the plurality of functional mechanisms in religious moderation. It also enriches contextual theology and the sociology of religion by demonstrating how indigenous values can be integrated into sustainable and context-sensitive social cohesion strategies.

Keywords: Comparative Study; Indigenous Communities; Religious Moderation; Local Wisdom; Social Harmony.

Introduction

Indonesia is widely recognized as a nation with extraordinary cultural, ethnic, and religious diversity, which simultaneously represents a social asset and a serious challenge in maintaining social cohesion and harmony. Within this context, religious moderation is understood as a strategic approach that bridges differences, cultivates mutual respect, strengthens tolerance, and rejects extremism and violence committed in the name of religion (Espocito and Voll, 1996; Nasr, 2002). Religious moderation is not merely a normative state policy but a lived theological and social practice rooted in communal experience and historical engagement with conflict and reconciliation (Nanuru, Ruhlessin and Ruimassa, 2025). Within indigenous communities, such moderation values are often contextually integrated with local wisdom that is lived, practiced, and transmitted across generations as a guide for social relations (Sutrisna, 2021; Saparudin and SA, 2023).

In Maluku, values such as *hidup orang basudara*, *pela gandong*, and mutual cooperation (*gotong royong*) serve as foundational principles for building inclusive and sustainable interreligious relations, playing a crucial role in post-conflict social reconciliation following communal violence in the late 1990s (Mahyuddin, Pikahulan and Fajar, 2020; Dominggus, 2023). In Papua, meanwhile, the *noken* symbol of unity and the principle of customary deliberation shape collective awareness in addressing differences—including religious diversity—through dialogical and balanced means (Kayame, 2022; Nur, 2022). The integration of these local wisdom values contributes to the formation of inclusive, adaptive, and just communities (Pamungkas and Tri, 2021). However, systematic comparative studies examining the relationship between indigenous values and state-formulated religious moderation policies remain limited and require further scholarly attention (Hasan and Susanto, 2019; Faisal *et al.*, 2022).

The primary research question of this study is: How are local wisdom values integrated into the practice of religious moderation within indigenous communities in Maluku and Papua? This question is further elaborated through three sub-questions: 1) What local wisdom values support religious moderation practices in each region? 2) How do local values interact with national religious moderation policies? 3) What similarities and differences characterize this integration across the two indigenous contexts? These questions reveal local dynamics that may inform nationally relevant models of contextual religious moderation.

The novelty of this study lies in its comparative interregional approach, which identifies patterns of local wisdom integration within religious moderation practices. Existing studies on religious moderation tend to emphasize normative or policy-oriented dimensions, often overlooking the indigenous-based local context (Akhmadi, 2019). This study offers a contextualized perspective by examining how traditional values actively function as moderation strategies at the community level (Zubaidi, 2024). Such an approach expands understanding of religious moderation as a pluralistic rather than uniform model, aligned with distinct local characteristics (Khoiruddin and Khulwah, 2023).

The urgency of this study aligns with Indonesia's national development vision as articulated in the *Asta Cita* document, notably the Sixth Vision—building from villages to

promote economic equity and poverty alleviation—and the Eighth Vision, which emphasizes harmonizing social life with local culture and enhancing tolerance in plural societies (Wisnubroto, 2024). This research contributes to both visions by providing empirically grounded insights into how local wisdom values strengthen social cohesion, build mutual trust, and maintain community security. By adopting an organic, community-based approach to religious moderation, this study demonstrates that social development depends not only on structural policies but also on strengthening local social and cultural capital. Consequently, this research supports inclusive, sustainable, and contextual national development, affirming local wisdom as a strategic foundation for nurturing social harmony.

Amid increasing risks of radicalism, identity polarization, and digital-era challenges, religious moderation grounded in local wisdom emerges as an effective conflict-prevention strategy. This study employs a qualitative comparative-conceptual approach consistent with structural functionalism theory, which emphasizes the role of cultural and social elements in maintaining societal equilibrium (Parsons, 1951). Within this framework, local wisdom values function as mechanisms that sustain harmony and social stability through religious moderation practices.

The findings of this study are expected to provide both conceptual and practical foundations for developing interfaith dialogue programs and strengthening tolerance rooted in local contexts. Indigenous values possess strong social binding power and cultural legitimacy. By integrating local wisdom into religious moderation policies and practices, social development becomes more contextual, participatory, sustainable, and grounded in everyday community life. Such integration enables religious moderation to be understood as a collective social practice rather than merely a state agenda.

Accordingly, this study aims to analyze and compare the forms of local wisdom integration in religious moderation practices among indigenous communities in Maluku and Papua. The analysis focuses on social dynamics, the roles of customary and religious actors, and internal community mechanisms for maintaining tolerance and solidarity. Additionally, the study identifies supporting and inhibiting factors—structural, cultural, and institutional—that influence this integration process. Ultimately, this research seeks to formulate strategic recommendations that strengthen the development and implementation of locally grounded religious moderation across socio-cultural contexts.

Methodology

This study employed a qualitative-descriptive approach with a comparative case study design to examine the integration of local wisdom values into the practice of religious moderation within indigenous communities in two distinct socio-cultural contexts, namely Maluku (Ambon) and Papua (Sorong). A qualitative approach was chosen because it enables an in-depth exploration of meanings, lived experiences, and social dynamics embedded in community life contextually and holistically (Creswell and Poth, 2018). The comparative case study design was applied to analyze similar phenomena across different contexts, identifying shared patterns, contextual differences, and local particularities characterizing each research site (Yin, 2018).

Data collection was conducted through participatory observation, in-depth interviews, and field documentation. Participatory observation involved direct engagement in customary and religious activities, including interreligious interactions, allowing the researcher to capture naturally occurring practices of religious moderation within everyday social life. In-depth interviews were conducted using a semi-structured format with customary leaders, religious leaders, and local community members, with a minimum of 8 informants per research location. This interview technique was selected to elicit subjective perspectives, lived experiences, and interpretative understandings of local wisdom and religious moderation from key social actors (Agung *et al.*, 2024). Documentation included narrative field notes, interview transcripts, and audio-visual recordings to enrich the data and strengthen analytical context.

The research process was carried out in three main stages. The first stage involved research preparation, including a literature review, the development of research instruments such as interview guidelines and observation sheets, and the acquisition of research permits from local government authorities and customary institutions. The second stage consisted of field data collection through direct observation and individual interviews, without focus group discussions, to obtain more personal, authentic, and context-sensitive data. The third stage focused on data verification and validation through source triangulation, comparing information received from customary leaders, religious figures, and local officials. Triangulation was employed to enhance the credibility and trustworthiness of qualitative research findings (Denzin, 2017; Denzin & Lincoln, 2005).

Data analysis was conducted manually using a thematic analysis approach. The analytical process began with repeated and comprehensive readings of interview transcripts and field notes, followed by systematic coding of relevant data segments. These codes were then organized into analytical categories, such as inclusive local values, interreligious practices, and community responses to national religious moderation policies. Subsequently, the categories were developed into overarching themes that represented patterns of integration between local wisdom and religious moderation practices. A comparative analysis across the two research sites was conducted to identify similarities, differences, and unique local dynamics. Thematic analysis was selected for its flexibility and effectiveness in uncovering patterns of meaning in qualitative socio-cultural data (Braun and Clarke, 2021).

Results and Discussion

1. Analysis of Findings and Research Novelty

Studies on religious moderation in Indonesia have increasingly emphasized the importance of local approaches in strengthening tolerance and preventing radicalism through the integration of theological, social, and anthropological values that mediate between religious texts and lived communal contexts (Qorib and Umiarso, 2025). Saparudin and Al-Idrus (2023) argue that religious moderation grounded in local wisdom can effectively reinforce social cohesion in plural societies. On a global scale, Esposito and Voll (1999) emphasize that democratic stability and social harmony in religiously diverse societies depend significantly on the accommodation of local cultural values within religious practices. Nevertheless, most existing studies remain normative and have not sufficiently examined, contextually and comparatively, how indigenous values are concretely integrated into religious moderation practices.

Research conducted by Mahyuddin et al. in Maluku demonstrates the crucial role of *Pela Gandong* in rebuilding interreligious trust in post-conflict contexts. However, it does not explicitly link this indigenous mechanism to national religious moderation policies (Mahyuddin, Pikahulan and Fajar, 2020). Similarly, Pamungkas and Tri examine conflict prevention in Papua but do not explicitly address symbolic indigenous values such as *noken* or the institutional structure of customary deliberation (Pamungkas and Tri, 2021) (9). Hasan and Susanto (2019) discuss the relationship between religion and local tradition in indigenous communities but do not offer a comparative analysis across different regional contexts.

This study advances the field by adopting a qualitative comparative–conceptual approach that enables the identification of patterns through which local wisdom is integrated into religious moderation across two distinct indigenous contexts: Maluku and Papua. Grounded in structural functionalism, this approach highlights the role of cultural values as functional mechanisms that sustain social cohesion (Parsons, 1951). The study also responds to Nasr’s (2002) argument that local spiritual and cultural values possess universal potential for promoting peace and pluralism. The primary novelty of this research lies in the formulation of a comparative framework that conceptualizes the integration of indigenous values into religious moderation in light of regional characteristics, thereby offering a locally grounded, policy-relevant model.

2. Mapping Forms of Integration and the Functional Roles of Local Wisdom

This section presents descriptive qualitative findings on local wisdom values that function as structural supports for religious moderation in the two research sites: Ambon (Maluku) and Sorong (Papua). This mapping directly addresses the first research question concerning the indigenous values that sustain religious moderation practices in each region. Using a structural-functional perspective, these cultural values are understood as active functional mechanisms that maintain social harmony and stability.

2.1. Maluku (Ambon): The Restorative Function of *Pela Gandong* and *Hidup Orang Basudara*

Indigenous communities in Maluku are supported by foundational values such as *hidup orang basudara* (living as siblings), *pela gandong* (inter-village or inter-community kinship bonds, often transcending religious boundaries and, in contemporary contexts, even extending across educational institutions), and *gotong royong* (mutual cooperation). These values constitute the basis of resilient interreligious relations by embodying a relational theology that prioritizes kinship, solidarity, and mutual responsibility across religious boundaries (Niemandt, 2014). In the Malukan context, this relational framework has played a decisive role in restoring social cohesion in the aftermath of the large-scale communal violence of the late 1990s, with *pela gandong* functioning as a culturally embedded mechanism for rebuilding interreligious trust and collective moral responsibility in post-conflict settings.

From a functionalist perspective, local wisdom in Maluku operates primarily as a restorative mechanism. Its central function is to re-establish social equilibrium after significant social dysfunctions, such as communal violence. The resilience of this customary structure lies in its capacity to activate the collective memory of kinship and shared moral obligations. The integration of *Pela Gandong* into religious moderation manifests in three primary forms: 1) joint

reconciliation rituals involving communities of different faiths, 2) collective recognition of equality among *Pela* members under both customary law and religious norms, and 3) the use of *Carita Orang Basudara* narratives within tolerance education programs (Mahyuddin, Pikahulan and Fajar, 2020).

While this structure provides a robust, conflict-tested framework for moderation, it also carries the risk of fostering a reactive form of tolerance, in which social cohesion mechanisms become fully activated only after conflict or trauma has occurred. To mitigate this risk, national and regional policies should seek to transform *pela gandong* from a predominantly restorative mechanism into a more institutionalized preventive mechanism by ensuring its relevance and activation during periods of social peace (Dominggus, 2023).

2.2. Papua (Sorong): The Preventive Function of Noken and Customary Deliberation

In Papua, the study identifies core indigenous values, such as *noken*, as foundational mechanisms supporting religious moderation, functioning as public theological symbols of dignity, equality, and collective responsibility (Koopman, 2010). These values shape inclusive and balanced collective attitudes toward difference, including religious diversity, thereby functioning as preventive mechanisms against social conflict (Dominggus, 2023).

Noken symbolizes collective ownership and shared responsibility, while customary deliberation represents an authoritative decision-making structure that obliges the inclusion of diverse perspectives. The integration of these values into religious moderation is evident in: 1) collective consensus regarding boundaries of religious practice, 2) inclusive communal attitudes toward religious diversity, and 3) the active involvement of customary leaders in interreligious dialogue (Kayame, 2022; Nur, 2022).

This model of moderation relies heavily on the authority of customary institutions. When such authority is weakened by external pressures—such as political interests, economic marginalization, or regional political tensions related to Papuan identity—the preventive function of moderation may also be compromised. Consequently, strategic policy frameworks must prioritize protecting and reinforcing customary deliberation as a frontline defense against polarization. Strengthening functional customary autonomy is essential to sustaining social cohesion in Papua (Hakim and Abdurahman, 2023).

2.3. Mapping the Forms of Integration between Local Values and the Principles of Religious Moderation

The following mapping classifies the research findings by the integration of local wisdom across the four core pillars of religious moderation. It illustrates how the functional roles of indigenous values operate in the two research contexts, highlighting the distinct yet complementary mechanisms through which local wisdom supports religious moderation in Maluku and Papua.

Table 1: Functional Comparison of Local Wisdom in Religious Moderation

Comparative Aspect	Indigenous Community of Maluku (Ambon)	Indigenous Community of Papua (Sorong)
Core Local Wisdom Values	<i>Pela Gandong, Hidup Orang Basudara, Gotong Royong</i>	<i>Noken</i> , Customary Deliberation (<i>Musyawaharah Adat</i>), Collective Principle
Key Function (Functionalism)	Conflict restoration mechanism and the foundation of interfaith kinship (Restorative Function).	Mechanism for shaping collective attitudes, unity, and togetherness amid diversity (Preventive Function).
Integration of Moderation Principles		
Tolerance	High, manifested through joint rituals, mutual support, and collective responsibility in managing conflict.	High, manifested through deliberative equality and acceptance of religious identity differences.
Non-Violence	Kuat, sebagai akibat dari trauma konflik masa lalu dan kewajiban <i>pela</i> untuk saling melindungi.	Strong, resulting from a collective consensus that upholds human dignity.
Commitment to National Unity	Integrated through shared historical recognition of sovereignty across Muslim and Christian communities.	Challenged by regional political issues that may shift emphasis from unity toward exclusive identity claims.

3. Comparative Analysis of Integration Patterns across Indigenous Regions

This analysis addresses the research question concerning the similarities and differences in integration patterns across indigenous regions, highlighting why models of religious moderation grounded in local wisdom should not be treated as monolithic. While there are functional similarities in which indigenous values serve as stabilizing mechanisms that support social cohesion, there are also significant contextual differences between the restorative model observed in Maluku and the preventive model identified in Papua. These differences reflect distinct historical experiences, social structures, and modes of community governance, demonstrating that effective religious moderation must be responsive to regional characteristics rather than based on uniform approaches.

3.1. Functional Similarities: Indigenous Values as Stabilizing Mechanisms

The primary similarity across both regions is that local wisdom values serve as a foundational basis for inclusive and balanced interreligious relations, thereby fostering stable communities. From a structural functionalist perspective, *pela gandong* and *noken* operate as collective symbols that transcend religious identity boundaries. These structures functionally prevent the disintegration of plural societies by ensuring that the social system maintains equilibrium. Both moderation models are therefore classified as organic and grounded

approaches, emerging from lived, local traditions rather than uniform, normative policy-driven frameworks.

3.2. Contextual Differences: *The Restorative Model of Maluku versus the Preventive Model of Papua*

Although both contexts achieve the same functional objective—namely, social cohesion—the processes and patterns through which integration occurs differ significantly, shaped by distinct historical experiences and dominant social structures.

- Maluku (Restorative Model): Integration is driven by historical trauma. The moderation mechanism (*pela gandong*) is contractual and historically embedded, emphasizing reciprocal obligations that are reactivated in post-conflict contexts. This model represents a form of moderation rooted in collective memory.
- Papua (Preventive Model): Integration is driven by structural governance. The moderation mechanisms (*noken* and customary deliberation) are consensual and authoritative, emphasizing continuous collective acceptance of difference. This represents a form of moderation grounded in customary authority.

These contrasting patterns demonstrate that national policy approaches cannot be uniform. Uniform policies risk failure by overlooking this functional duality. The analysis indicates that effective policy interventions must specifically address Maluku, a context requiring institutional reinforcement to address historical trauma—particularly through the formal legal strengthening of *pela gandong*—while recognizing Papua. This context necessitates structural protection from external pressures through the reinforcement of customary deliberative autonomy. Accordingly, models of religious moderation must remain pluralistic and aligned with local characteristics.

4. Dynamics of Policy Interaction and Contemporary Factors

4.1. Interaction Patterns: *The Involvement of Local Wisdom in National Policy*

The analysis identifies two primary patterns of interaction between indigenous (organic) structures and state (formal) policies in the context of religious moderation, addressing the research question concerning these interaction dynamics.

1. Structural Channeling in Maluku: National religious moderation policies—such as interreligious dialogue programs—are received and mediated through the already stable *pela gandong* structure. In this context, *pela* functions as a channel of both legitimacy and implementation, reducing friction between central policies and local traditions. The strong moral bonds and shared historical memory embedded in *Pela Gandong* facilitate rapid and effective policy implementation, ensuring community acceptance and sustainability (Azman, Daud and Moderation, 2025).
2. Authority Subsumption in Papua: In Papua, values of religious moderation are implicitly embedded within the principles of customary deliberation. Interaction occurs when national policies are subsumed into collective customary decisions, rather than imposed externally. Customary leaders act as filters and translators of policy, ensuring that formal state initiatives align with, rather than undermine, local autonomy and indigenous authority (Hakim and Abdurahman, 2023).

The key to the effectiveness of these interaction patterns lies in the state's recognition of indigenous structures as functional. When the state acknowledges local wisdom as a mechanism that actively supports social stability, resulting policies become organic and sustainable. Accordingly, policy strategies in Maluku should focus on strengthening the channel (*pela gandong*), whereas in Papua they should prioritize reinforcing the filter—namely, customary deliberative institutions.

4.2. Contemporary Supporting and Inhibiting Factors

This study also seeks to identify contemporary factors that support or hinder the integration of local wisdom into religious moderation practices. The primary supporting factor is the institutional strength of customary institutions, which possess both social and spiritual legitimacy. In both regions, customary leaders and religious leaders actively collaborate to maintain interreligious harmony. Additionally, forms of transcendent solidarity—such as the value of *pela* in Maluku—transcend religious boundaries and create morally binding kinship ties (Malisngolar and Sugiswati, 2017).

However, several external dysfunctions hinder this integration:

- 1. Digital Dysfunction: Identity polarization in the digital era poses a significant challenge that cannot be fully addressed by traditional mechanisms rooted in territorial proximity and face-to-face interaction.
- 2. Political Dysfunction: In Papua, political issues related to independence and regional identity are a significant impediment. These issues have the potential to fragment solidarity along ethnic and religious lines, thereby eroding social cohesion (Hakim and Abdurahman, 2023).
- 3. Scholarly Dysfunction: The lack of systematic, comparative literary studies has led to national policies that are often insufficiently responsive to the cultural contexts of indigenous communities, thereby reducing their effectiveness.

Table 2: Supporting and Inhibiting Factors in Contextual Integration

Region	Primary Supporting Factors (Internal/Organic)	Primary Inhibiting Factors (External/Dysfunctional)
Maluku (Ambon)	Institutional strength of <i>Pela Gandong</i> and post-conflict collective memory.	Unresolved historical trauma and challenges arising from identity politics.
Papua (Sorong)	Legitimacy of customary deliberation (<i>Musyawarah Adat</i>) and the unifying symbol of <i>Noken</i> .	Digital polarization, challenges related to non-inclusive development, and regional political issues that threaten social cohesion.

5. Structural Functionalism and the Role of Local Wisdom in Religious Moderation in Maluku and Papua

This study positions local wisdom values as essential elements within the Parsonian theory of social systems, which emphasizes how cultural components function to maintain social balance and stability. From this perspective, indigenous values are not peripheral cultural expressions but constitutive mechanisms that sustain social order through their functional roles within the broader social system.

5.1. *Local Values as Latent and Manifest Functions within the Social System*

Local wisdom traditions such as *pela gandong* and *noken* operate as latent functions within indigenous social systems. These latent functions—such as tolerance and inclusivity—become manifest functions through concrete practices of religious moderation. In Maluku, the latent function of *pela gandong* is strongly manifested as a restorative response to social dysfunction, particularly communal conflict. In contrast, in Papua, the latent function of customary deliberation is manifested as a preventive mode of social governance that continuously manages diversity.

The active roles of customary and religious leaders as social gatekeepers are crucial in this process. Their mediation ensures that indigenous values are effectively integrated into formal religious practices, allowing cultural structures and social institutions to operate in harmony. This integration reinforces social stability by aligning moral norms, spiritual expressions, and customary authority within a coherent functional system.

5.2. *Social Equilibrium through Practices of Cultural Moderation*

The findings demonstrate that social equilibrium in both regions is achieved through a mechanism of integrative differentiation, in which religious moderation serves as a mediating framework that enables religious and ethnic differences to coexist without destabilizing the social system. Religious moderation thus serves as a functional medium through which diversity is regulated and sustained rather than suppressed.

The primary theoretical contribution of this study is the formulation of the concept of Pluralistic Contextual Functionalism, which situates religious moderation within broader processes of social transformation and ethical reconstruction (Gruchy, 2007). This model posits that social stability in Indonesia's plural society is achieved through a plurality of functional mechanisms that operate differently across contexts—namely, restorative mechanisms in Maluku and preventive mechanisms in Papua. Comparative findings indicate that two distinct cultural structures (*pela gandong* and customary deliberation) can produce the same functional outcome (religious moderation) through different processes. Consequently, social policy must respond to region-specific functional needs to foster social cohesion, rejecting one-size-fits-all approaches.

6. An Integrative Model of Local Wisdom–Based Religious Moderation: Conceptual Novelty and Strategic Recommendations

This study develops a comparative conceptual framework of integration, which constitutes its primary scholarly contribution. The framework is intended to serve as a policy reference for locally grounded, contextual, inclusive, and sustainable approaches to religious moderation.

6.1. Formulating a Conceptual Framework for Integrating Local Wisdom Values

The proposed model consists of three pillars of functional integration:

1. **Customary Recognition Pillar:** Government institutions must formally recognize the authority of local wisdom structures—*Pela Gandong* in Maluku and customary deliberation (*Musyawarah Adat*) in Papua—as equal partners and functional institutions in religious moderation. Such recognition should include explicit legal acknowledgment.
2. **Functional Operationalization Pillar:** Indigenous values must be activated through specific, context-sensitive programs, with differentiated modes of activation: restorative in Maluku and preventive in Papua.
3. **Digital Resilience Pillar:** Digital defense mechanisms, particularly media literacy initiatives, should be integrated into customary structures to counter external dysfunctions, such as identity polarization, in the digital era.

6.2. Policy Brief: Strategic Recommendations for Strengthening Contextual Religious Moderation

The strategic recommendations formulated in this policy brief are directed toward supporting inclusive development grounded in local wisdom, in alignment with Indonesia's national development vision.

1. **Recommendations for Maluku (Institutional Reinforcement):**
 - Focus: Strengthening the legal and institutional dimensions of *Pela Gandong*.
 - Action: Promoting regional policies that formally integrate *Pela Gandong* mechanisms into social conflict resolution procedures, thereby granting it legitimacy as a recognized mediation institution.
2. **Recommendations for Papua (Structural Protection):**
 - Focus: Safeguarding the autonomy and authority of customary deliberation from political interference and external pressures.
 - Action: Providing budgetary support and technical training for customary leaders to facilitate interreligious dialogue and digital literacy, thereby reinforcing customary autonomy as a policy filter.
3. **Comparative Recommendations (National Integration):**
 - Focus: Shifting the national religious moderation approach from uniformity toward pluralism.
 - Action: Developing differentiated religious moderation education modules for Eastern Indonesia that explicitly incorporate local narratives from Maluku and Papua, acknowledging that effective models must remain plural and aligned with local characteristics.

Conclusion

This study finds that local wisdom plays distinct functional roles while equally sustaining the practice of religious moderation. In Maluku, *Pela Gandong* and the philosophy of *Hidup Orang Basudara* function as restorative mechanisms that rebuild trust and social cohesion in

post-conflict contexts. In contrast, in Papua, the *Noken* symbol and *customary deliberation* (*Musyawarah Adat*) function as structural preventive mechanisms that maintain collective equality and prevent polarization from the outset. These differences affirm that the practice of religious moderation in Indonesia must be pluralistic and responsive to the specific local characteristics of each region.

These findings give rise to the conceptual framework of Pluralistic Contextual Functionalism, which posits that social stability in plural societies is achieved through distinct functional mechanisms. Maluku demonstrates a pattern of *structural channeling*, in which public policies are mediated through strong customary institutions. In contrast, Papua exhibits a pattern of *authority subsumption*, whereby formal policies are legitimized through customary deliberative structures. Accordingly, religious moderation policies cannot be uniform; they must be tailored to the functional needs of each region.

From a practical perspective, this study offers concrete contributions by formulating strategic recommendations that can be implemented in public policy and locality-based community empowerment programs. These recommendations include strengthening the formal legal recognition of *Pela Gandong* as an institution for social and religious conflict mediation in Maluku, enabling it to function not merely as a cultural heritage but also as an institutionally recognized mechanism for conflict resolution and community-based peacebuilding. In Papua, the study emphasizes the importance of protecting and reinforcing the autonomy of *customary deliberation* as a highly legitimate deliberative space for indigenous communities in managing differences, including religious diversity and political interests. Furthermore, the study recommends the development of contextual religious moderation education modules for Eastern Indonesia that integrate local wisdom values into formal and non-formal educational settings, such as religious education, schools, and community training programs. These local wisdom values constitute national assets with strong social resilience and intergenerational relevance. When thoughtfully integrated into national religious moderation strategies, they hold significant potential to strengthen social cohesion, build intergroup trust, and foster sustainable social harmony aligned with the dynamics of social change and contemporary challenges.

Acknowledgements

The authors would like to express their gratitude for all the assistance provided by various parties in this research, including:

1. The Directorate of Research, Technology, and Community Service (DRTPM), Directorate General of Higher Education, Research, and Technology, for the funding of the 2025 Regular Fundamental Research.
2. The Higher Education Service Institute Region XII in Ambon, and the Research Institute of the Indonesian Christian University of Maluku, for facilitating the process from the proposal writing to the reporting of this research.

References

Agung, D. A. G. *et al.* (2024) 'Local wisdom as a model of interfaith communication in creating religious harmony in Indonesia', *Social Sciences & Humanities Open*, 9, p. 100827. doi:

<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100827>.

Akhmadi, A. (2019) 'Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia', *INOVASI: Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), pp. 45–55. Available at: <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/82>.

Azman, A., Daud, M. and Moderation, I. A. R. (2025) 'Pela Gandong, and Jihad Reconstruction: conflict Prevention in Maluku through the Lens of Maqāṣid Al-Sharī'ah'. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, pp. 394–415. Available at: <https://shorturl.asia/id/GSXw9>.

Braun, V. and Clarke, V. (2021) *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications. Available at: <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481>.

Creswell, J. W. and Poth, C. N. (2018) *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. 4th edn. SAGE Publications. Available at: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>.

Denzin, N. K. (2017) *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge. doi: <https://doi.org/10.4324/9781315134543>.

Denzin, N. K. and Lincoln, Y. S. (2005) *Handbook of Qualitative Research*. Third Edit. California: Sage Publications, Inc. doi: 10.4324/9780203409527.

Dominggus, D. (2023) *Systematic Literature Review: Fenomenologi Moderasi Beragama Islam dan Kristen di Maluku Berdasarkan Budaya Pela Gandong*. MELO: Jurnal Studi Agama-agama. Available at: <https://shorturl.asia/VBTO6>.

Espocito, J. and Voll, J. (1996) *Islam and Democracy*. Oxford University Press. Available at: <https://bit.ly/3DXcGF6>.

Esposito, J. L. (1999) *The Islamic threat: Myth or reality?* Oxford University Press.

Faisal, A. *et al.* (2022) 'Strengthening religious moderatism through the traditional authority of kiai in Indonesia', *Cogent Social Sciences*, 8(1). Available at: <https://shorturl.at/Z5lJF>.

Gruchy, J. de (2007) 'Public Theology as Christian Witness: Exploring the Genre', *International Journal of Public Theology*, 1(1), pp. 26–41. doi: <https://doi.org/10.1163/156973207X194466>.

Hakim, L. Al and Abdurahman, D. (2023) 'MODERASI BERAGAMA DI PAPUA: Rekonstruksi Identitas dan Resolusi Kehidupan Keagamaan Pasca Konflik Papua 1998-2001', *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), pp. 49–64. doi: 10.14421/jsa.2023.171-04.

Hasan, H. and Susanto, E. (2019) 'Relasi Agama dan Tradisi Lokal'. Surabaya: Jakad Media Publishing. Available at: <https://shorturl.at/FyIKj>.

Kayame, Y. (2022) 'Kearifan Lokal “Noken” Papua bagi Nilai Demokrasi Pancasila di Indonesia', *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2022(12), pp. 448–456. doi: url:

Khoiruddin and Khulwah, J. (2023) 'Moderasi Beragama dalam Kearifan Lokal pada Masyarakat Pesisir Barat Provinsi Lampung', *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(1), pp. 76–91. doi: url:

Koopman, N. (2010) “Public theology and human dignity”, *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 66(1), p. 312. doi: 10.4102/hts.v66i1.312.

Mahyuddin, M., Pikahulan, R. and Fajar, M. (2020) 'Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN

- Ambon dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku', *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13(1), pp. 103–124. doi: url:
- Malisngolar, J. and Sugiswati, B. (2017) 'Pela Gandong Sebagai sarana Penyelesaian Konflik', *Perspektif*, 22(1), pp. 67–79. Available at: https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/589/pdf_104.
- Nanuru, R. F., Ruhulestin, J. C. and Ruimassa, A. A. (2025) "'A contextual model of religious moderation in the 'Orang Basudara' Church: Insights from the Protestant Church of Maluku (GPM)'", *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 81(1), p. 10467. doi: 10.4102/hts.v81i1.10467.
- Nasr, S. H. (2002) *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. United State: HarperCollins Publishers, United State. Available at: <https://shorturl.at/nHuel>.
- Niemandt, C. J. P. (2014) "'Relational mission and the church in plural societies'", *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 70(1), p. 2680. doi: 10.4102/hts.v70i1.2680.
- Nur, I. (2022) 'Religious Education Based of Local Wisdom "Satu Tungku Tiga Batu" in Fak-Fak Community West Papua', *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(4), pp. 6631–6642. doi: url:
- Pamungkas, C. and Tri, I. (2021) 'Preventing Religious Conflict in Papua Land: Adopting Cultural Traditions of Peacebuilding', *Asian Journal of Peacebuilding*, 9(2), pp. 331–356. doi: url:
- Parsons, T. (1951) *The Social System*. Glencoe, IL: Free Press. Available at: <https://shorturl.at/AxA7m>.
- Qorib, M. and Umiarso (2025) 'The religious moderation model based on the unity of socio-anthropological values in Muhammadiyah and NU pesantren in Indonesia', *Cogent Education*, 12(1), p. 14. doi: 10.1080/2331186X.2025.2584644.
- Saparudin and SA, A.-I. (2023) *Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal (Studi Awig-Awig Adat Sasak Islam dan Budha di Lombok Utara)*. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LPPM UIN Mataram. Available at: <https://bit.ly/3FUSp3B>.
- Sutrisna, A. (2021) 'Local Wisdom as the Basis for Religious Moderation in Indonesia Society to Realize Islamic Values Rahmatan lil' Alamin', *Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), pp. 243–256. doi: url:
- Wisnubroto, K. T. (2024) 'Tantangan Besar, Asta Cita, dan Keberlanjutan Pembangunan'. Available at: <https://shorturl.at/xyXI3>.
- Yin, R. K. (2018) *Case study research and applications: Design and methods*. 6th edn. SAGE Publications. Available at: <https://us.sagepub.com/en-us/nam/case-study-research-and-applications/book250150>.
- Zubaidi, A. (2024) 'Multicultural Insight in Promoting Tolerance Movement: Lessons Learned from Islamic Religious Education in the Rural Side', *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 11(1), pp. 19–35. doi: url:

Bukti Submit

←

→

↻

hts.org.za/index.php/hts/author/index

📄

📄

🔍

120%

☆

⬇️

⌵

Ⓡ

📧

➦

📌

☰

AOSIS

Publishing

ABOUT AOSIS

JOURNALS

BOOKS

Search AOSIS Library

🔍

HTS

THEOLOGICAL STUDIES

OPEN  ACCESS

HOME

ARTICLES

EDITORIAL TEAM

AUTHORS

SUBMIT MANUSCRIPT

ABOUT

CONNECT

X (FORMERLY TWITTER)

HOME

USER

AUTHOR

ACTIVE SUBMISSIONS

ACTIVE

ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
11205	14-Dec-25	ORI	Nanuru, Ruhuleessin, Ruimassa	INTEGRATING LOCAL WISDOM INTO RELIGIOUS MODERATION: A...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

KNOWLEDGE
EXCHANGE

f

Facebook

in

LinkedIn

X

X (formerly Twitter)

📡

Article RSS

👤

AUTHOR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. RICARDO FREEDOM NANURU S.Si, M.Phil

Alamat :-

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0419/C3/DT.05.00/2025 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 133/C3/DT.05.00/PI/2025 mendapatkan Anggaran Penelitian Studi Perbandingan Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Praktik Moderasi Beragama di Komunitas Adat Maluku dan Papua Sebesar Rp. 85.930.000

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan Penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	RAB 100%	Realisasi
1	Bahan ATK untuk Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan Penelitian, Analisis Data, Pelaporan dan Publikasi; Meterai; Tinta Printer Warna LaserJet 2100; Tinta Printer Hitam LaserJet 2100.	Rp. 4.250.000	Rp. 4.250.000
2	Pengumpulan Data Tiket; Transport lokal; Uang Harian; Penginapan; Konsumsi (anggota mahasiswa);	Rp. 55.710.000	Rp. 55.710.000
3	Analisis Data Honorarium Narasumber; Uang Harian;	Rp. 9.600.000	Rp. 9.600.000
4	Sewa Peralatan Sewa Ruang untuk sekretariat penelitian selama 6 bulan.	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000
5	Pelaporan Luaran Wajib Biaya Publikasi artikel di Jurnal Bereputasi Internasional	Rp. 12.770.000	Rp. 12.770.000
6	Lain-lain	Rp. 0	Rp. 0
Realisasi (100 %)			Rp. 85.930.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



Ambon, 14-12-2025, Ketua

Dr. RICARDO FREEDOM NANURU S.Si, M.Phil

NIP/NIPK 197906072005011003